Transformasi Digital Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas

Digital Transformation The General Meeting of Shareholders of a Limited Liability Company

Ikhsan Lubis

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: September 2021; Disetujui: Desember 2021; Dipublish: Desember 2021

*Corresponding Email: ikhsanlubis67@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan Transformasi Digital sebagai penerapan teknologi digital yang berhubungan dengan perubahan pola interaksi dalam semua aspek kehidupan manusia, dan tidak terkecuali dalam pengembangan konsep *cyber notary*. Keabsahan dokumen elektronik secara hukum diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan hukum akta notaris dalam RUPS Perseroan Terbatas melalui teleconference dengan media elektronik dimana wajib memakai mekanisme afirmasi serta/atau prosedur lain yang memberikan maksud serta tujuan penandatanganan buat terikat dalam suatu transaksi elektronik. Adapun akta RUPS teleconference termasuk dalam jenis akta relaas dan berdasarkan ketentuan akta relaas, maka keterangan Notaris dalam bentuk akta (RUPS teleconference dapat dipastikan keabsahannya).

Kata Kunci: Transformasi; Digital; RUPS; Perseroan Terbatas.

Abstract

This study aims to see the development of Digital Transformation as the application of digital technology related to changes in interaction patterns in all aspects of human life, and the development of the cyber notary concept is no exception. The legal validity of electronic documents was further strengthened by the issuance of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. This research is a normative juridical research and analytical descriptive using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study indicate that the legal validity of the notarial deed at the GMS of a Limited Liability Company through teleconference with electronic media where it is mandatory to use an affirmation mechanism and/or other procedures that provide the intent and purpose of the signing to be bound in an electronic transaction. As for the deed of the GMS teleconference, it is classified as a relaas deed and based on the provisions of the relaas deed, the notary's statement is in the form of a deed (the validity of the teleconference GMS can be ascertained).

Keywords: Transformation; Digital; GMS; Limited company.

How to Cite: Lubis, I (2021). Transformasi Digital Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8 (2) 2021 : 130-141

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, menuntut notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum untuk mengikuti perkembangan tersebut. Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian wewenang dari kekuasaan negara khusus membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Sebagaimana wewenang yang diberikan kepada notaris oleh negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, maka jabatan notaris bukanlah jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo terus berupaya melakukan akselerasi transformasi digital, salah satunya dengan menyiapkan Roadmap Digital Indonesia 2021-2024. Peta jalan itu mencakup empat sektor strategis, yaitu infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat digital.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN menjelaskan bahwa notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik yang terkait dengan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan minuta akta, memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang memberikan pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain oleh peraturan perundang-undangan.

Media elektronik sebagai salah satu alternatif yang mempertemukan maksud dan kehendak para pihak meskipun tidak berhadapan secara langsung (physical activity), dan media elektronik yang dapat dipergunakan antara lain teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis sistem digitalisasi.

Media elektronik yang dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang juga sering dikenal dikenal zoom cloud meetings (ZCM), telekonferensi dan email address yang kesemuanya merupakan media elektronik sebagai alat komunikasi jarak jauh dengan sistem dokumentasi hasil yang akurasi rekaman pendataannya sangat baik dan dapat dipercaya serta sangat mudah untuk dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebijakan Pemerintah dalam situasi darurat pandemic covid-19 melakukan kegiatan pekerjaan dirumah saja (Work From Home).

Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi Perseroan Terbatas dibuat ke dalam, maka pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dilakukan dengan memberi kuasa kepada salah seorang yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat di hadapan Notaris. Permasalahan mengenai pembuatan akta Notaris secara elektronik dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) UU PT tidak hanya berbenturan dengan ketentuan yuridis mengenai kehadiran dari Notaris, para pihak dan juga saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 Ayat (9) UUJN. Tetapi, ada persoalan yang lebih urgent karena adanya pembatasan terhadap pembuatan akta Notaris secara elektronik dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dibuktikan bagaimana kekuatan pembuktian risalah rapat yang dimuat oleh

notaris (Akta Berita Acara RUPS), kemudian bagaimana Keabsahan Akta Autentik RUPS Teleconference Menurut UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 77 UU Perseroan Terbatas, dan bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik dalam pelaksanaan RUPS elektronik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). (Marzuki, 2007). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari, bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data adalah Studi kepustakaan (*Library Research*) dan Studi lapangan (*Field Research*) untuk lebih mengembangkan penelitian ini. Penelitian dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang berdasarkan asumsi mengenai realitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keabsahan hukum akta notaris dalam RUPS Perseroan Terbatas melalui *teleconference* dengan media elektronik dimana wajib memakai mekanisme afirmasi serta/atau prosedur lain yg memberikan maksud serta tujuan penandatanganan buat terikat dalam suatu transaksi elektronik. Adapun akta RUPS *teleconference* termasuk dalam jenis akta *relaas* dan berdasarkan ketentuan akta *relaas*, maka keterangan Notaris dalam bentuk akta (RUPS *teleconference* dapat dipastikan keabsahannya).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Transformasi Digital Di Indonesia Saat Pandemi

Perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini memaksa kita untuk mampu beradaptasi dengan proses

percepatan transformasi digital. Transformasi digital ini ditandai dengan Revolusi Industri 4.0 yang menghendaki perubahan mendasar dalam segala aspek kehidupan dengan perubahan paradigma berpikir dengan dari teknologi digital, dan untuk selanjutnya perkembangan inovasi terbaru dikenal sebagai transformasi digital.

Transformasi Digital merupakan bahagian terpenting dalam penerapan teknologi digital yang berhubungan dengan perubahan pola interaksi dalam semua aspek kehidupan manusia, dan tidak terkecuali dalam pengembangan konsep *cyber notary*. Adanya konsep *cyber notary* memungkinkan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang berbasis sistem digitalisasi media elektronik yang terhubung secara langsung dengan jaringan internet (bersifat *online*, internet *mainstream*) yang kesemuanya merupakan salah satu bentuk inovasi transformasi digital yang telah dan akan terus mengikuti perkembangan rekayasa teknologi masa depan. termasuk dan tidak terbatas kepada perkembangan teknologi yang muncul seperti kecerdasan buatan (AI), *cloud computing* dan *Internet of Things* (IoT).

Penggunaan teknologi canggih dalam era-globalisasi yang ditandai dengan adanya transformasi digital sekarang ini telah memberikan peluang lebih kuat untuk memberikan kemudahan dalam pola interaksi dalam segala aspek kehidupan yang diikuti dengan perubahan pola berpikir (paradigma) untuk memberikan respon positif terhadap berbagai peluang yang memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan akurasi data maupun informasi yang diharapkan sebagai konsep bekerja yang sesuai dengan target penyelesaian tugas-tugas atau tujuan yang ingin dicapai.

Konsep *cyber notary* melalui *platform* terbaru yang akan terhubung secara langsung pada jaringan internet dengan sistem yang berbasis sistem digitalisasi media elektronik telah berkembang sebagai integrasi teknologi digital atau transformasi digital.

Perkembangan situasi dan keadaan kedaruratan kesehatan terkait dengan penyebaran pandemik virus *Covid 19* termasuk keadaan yang sangat luar biasa sehingga perlu dipertimbangkan kebijakan khusus dalam pelayanan publik. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan tanpa melanggar aturan yang sudah ditetapkan, terutama dalam kaitannya tugas-tugas jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum yang hanya melaksanakan kegiatan di rumah saja (*Work From Home*) sesuai kewenangan yang ada berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUN yang menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Keabsahan Akta Autentik RUPS *Teleconference* Menurut UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 77 UU Perseroan Terbatas. Diatur dalam Pasal 38 UUN yang mengatur akhir akta dari sebuah akta terkait penyebutan uraian tentang pembacaan akta terkait Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUN juga mengatur tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan. Dengan memenuhi Pasal 38 UUN mengenai bentuk akta yang bertujuan agar akta yang dibuat menjadi akta autentik maka dalam pelaksanaan risalah RUPS secara elektronik harus disebutkan secara tegas pada akhir akta mengenai penandatanganan secara elektronik dan tempat penandatanganan.

Selama ini yang masih menjadi hambatan yakni dalam proses pertukaran data, pemindahan dan penyimpanan.

Selama yang digunakan masih server umum seperti *cloud*, *google*, *amazon* atau situs-situs lain sejenis, maka keamanan datanya menjadi lemah. Namun, apabila sudah dapat disediakan server khusus seperti di Jepang, maka kewajiban merahasiakan isi akta bagi Notaris di dalam konsep *cyber notary* tidak melanggar kewajiban Notaris. karena pada dasarnya *cyber notary* hanya merupakan sebuah pemanfaatan kemajuan teknologi bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya sehingga mengenai kewajiban Notaris tetap sesuai dengan UUN dan bukan membuka atau mempublikasikan akta-akta yang dibuat oleh Notaris. (Irma Devita, 2021)

Ketentuan dalam Pasal 39 harus dilaksanakan agar tetap menjaga keabsahan RUPS telekonferensi, berikut ketentuannya:

- a. Penghadap harus memenuhi syarat yakni paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum.
- b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- c. Pengenal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Berikut merupakan ketentuan lainnya terkait keabsahan RUPS telekonferensi yang diatur dalam Pasal 40 yang berbunyi:

- a. Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

- b. Saksi harus memenuhi syarat paling rendah berumur 18 tahun atau sebelumnya telah menikah; cakap melakukan perbuatan hukum; mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta; dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- c. Saksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- d. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta. (Irma Devita, 2021)

Pada pembuatan akta RUPS melalui *teleconference* dimana para peserta rapat berada ditempat yang berbeda dengan para peserta lainnya hendaknya disebutkan secara tegas untuk menghindari akta menjadi dibawah tangan, berbeda dengan pembuatan akta RUPS Konvensional dimana pada bagian penutup akta sudah menjelaskan bahwa para peserta rapat, saksi dan notaris berada pada suatu tempat dan waktu yang sama.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum akta risalah RUPS yang pelaksanaannya melalui media elektronik seperti *video conference* sebagai akta autentik apabila menggunakan asas perundang-undangan *lex specialis derogate legi generali* dimana yang menjadi *lex specialis*-nya adalah Pasal 77 Ayat (1) *jo.* Penjelasan Pasal 77 Ayat (4) UU PT., sedangkan *lex generalis*nya adalah Pasal 16 Ayat (1) huruf m.

Meskipun memang konsep *cyber notary* tidak melanggar prinsip kewajiban merahasiakan isi akta bagi Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f, justru disitulah letak permasalahannya, yakni karena regulasi tidak memadai maka potensi pelanggaran menjadi terbuka lebar. Dalam hal ini UUJN tidak cukup menjadi landasan *cyber notary*.

Kewajiban merahasiakan isi akta tetap dijamin oleh Undang-Undang, meskipun memang ada pengecualian dalam UU TIPIKOR seperti hak merahasiakan akan gugur (Winanto Martani, 2021).

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) *Jo.* Pasal 16 ayat (1) huruf f dari UUJN dapat disimpulkan rumusan hukum yang bersifat imperatif tentang kewajiban yang melekat dalam tugas jabatan sebagai Notaris dalam rangka merahasiakan isi akta dan keterangan-keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta, terkecuali Undang-Undang menentukan lain, yang apabila dikaitkan dengan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris sebagaimana dimuat dalam Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2017 sebenarnya tidak mungkin diterapkan dengan serta merta. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 16 Ayat 1 huruf m namun jika dilihat dari peraturan POJK, hal tersebut memberikan kemudahan terhadap Perseroan Terbuka terkait untuk pembuatan Risalah Rapatnya, apakah Notaris mau dan bersedia membuat Risalah Rapatnya.

Terkait dengan prinsip kewajiban merahasiakan isi akta sebenarnya, dalam konteks e-RUPS hal ini tidak dilihat bahwa disitu ada pelanggaran atas kerahasiaan karena Notaris membuat berita acara berdasarkan peristiwa dan perbuatan hukum yang terjadi. Proses data registrasi, kehadiran, dan juga pemungutan suara serta diskusi-diskusi yang tercantum di dalam rapat itu sebenarnya sudah diatur

sistem pengamanannya dari sejak pendaftaran atau registrasi, kemudian juga diatur oleh tata tertib yang disiapkan Perseroan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang hadir dalam rapat adalah pihak-pihak yang berhak atau dapat hadir dalam rapat. Ketika kita membuat berita acara berdasarkan data-data kehadiran, kuorum dan interaksi dalam rapat yang datanya bersifat elektronik sebenarnya disitu tidak ada aspek yang dilanggar (Aulia Taufani, 2021).

Sisi kerahasiaan pada kacamata akta Notaris artinya justru informasi pada akta Notaris yang tidak boleh kita ceritakan sesudah akta itu dirancang. Namun perlu diperhatikan pula bahwa pada konteks Perseroan Terbatas publik yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (PT Tbk) isu acara Notaris itu pada jangka 30 hari harus sudah disampaikan ke OJK serta dalam beberapa perkara buat memenuhi azas keterbukaan informasi program itu memang disediakan di *website* Perseroan Tbk, sehingga pada situs ada aspek publisitas.

Kerahasiaan akta bisa saja dibuka misalnya bila ada kasus, ada yang menyangkal tentang pemberian kuasa elektroniknya atau ada yang menyangkal registrasi secara elektroniknya, maka data-data itu baru bisa dibuka melalui prosedur pembuktian dengan standart data elektronik yang diatur dalam UU ITE dan kalau itu terkait dengan akta maka itu juga harus ada izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) (Aulia Taufani, 2021).

Keabsahan Akta Autentik RUPS *teleconference* menurut Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas

Berdasarkan penjelasan UU PT Pasal 77 Ayat (4) menyebutkan “Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.” Berdasarkan

UU PT penjelasan Pasal 77 Ayat (4) *jo.* Pasal 77 Ayat (4), dalam RUPS biasa atau konvensional, akta risalah RUPS ditandatangani oleh penghadap di hadapan Notaris secara langsung atau ditandatangani secara fisik.

Menurut Udin Narsudin, “kehadiran fisik asal pemegang saham dalam hal RUPS elektronik tak diperlukan. Pemegang saham yang berada di luar negeri tadi bisa disebut tetap menghadiri RUPS dimaksud dan hak suaranya namun dihitung pada quorum kehadiran”. Udin menuturkan pada saat penandatanganan akta RUPS dimaksud, pemegang saham yang keberadaannya pada luar negeri tadi dapat menandatangani dokumen rapat secara elektronika. Lebih lanjut menurut udin, pelaksanaan e-RUPS berdasarkan Pasal 77 UU PT tidak boleh mengubah esensi asal Pasal 38 UUN (Udin Narsudin, 2021).

Ketentuan tersebut dipertegas dengan Putusan MARI 3556 K/Pdt/1985 (walaupun untuk akta PPAT), yang mana pihak penjual sendiri tidak datang menghadap, tetapi hanya dihadiri pembeli saja dengan keterangan bahwa para pihak telah sepakat mengadakan transaksi jual beli. Pada kasus tersebut pengadilan menegaskan, perjanjian jual beli yang tertuang dalam akta PPAT secara yuridis tidak memenuhi syarat untuk sahnyanya akta, karena tidak dihadiri oleh para pihak (Udin Narsudin, 2021).

Alasan yang menyatakan akta demikian tidak sah adalah karena Akta Notaris yang bersifat *Partij* harus memuat keterangan yang saling bersesuaian antara kedua belah pihak sebagai landasan yang melahirkan persetujuan. Dari mana Notaris mengetahui adanya persesuaian pendapat antara para pihak, kalau yang datang memberikan di hadapan Notaris hanya satu pihak saja.

Salah satu sebab terhambatnya pelayanan jasa secara daring (salah satunya e-RUPS) dikarenakan terdapat syarat formil yang harus dipenuhi untuk

mendukung keabsahan Akta Notaris. Syarat-syarat formil tersebut adalah:

Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (Pasal 15 Ayat (1) UUJN).

Dihadiri para pihak (Pasal 16 Ayat (1) huruf l).

Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada Notaris (Pasal 39 UUJN-Perubahan).

Dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 UUJN).

Syarat formil kehadiran para pihak tersebut bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, artinya satu syarat saja tidak terpenuhi maka mengakibatkan Akta Notaris tersebut mengandung cacat formil dan berarti akibatnya tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Keabsahan Akta Autentik RUPS *teleconference* menurut UU Transaksi Informasi dan Elektronik (UU ITE)

Proses pembuatan risalah RUPS menjadi Akta Notaris, dimungkinkan melalui 2 (dua) cara yaitu: Pertama, dengan Akta Otentik yang dibuat langsung oleh Notaris dalam bentuk Berita Acara RUPS; kedua, risalah rapat dengan tidak menghadirkan notaris dituangkan ke dalam Akta Otentik yaitu dengan membuat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UUPT PKR dibuat paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS (Rizkianti, 2017).

Ditinjau dari satu sisi Pasal 77 UUPT ini memberikan legitimasi dalam pembuatan akta otentik RUPS melalui media telekonferensi namun di sisi lain terdapat ketidakharmonisan dengan regulasi terkait khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai pedoman notaris dalam menjalankan profesinya.

Penandatanganan daftar hadir RUPS untuk membuktikan bahwa benar para pemegang saham telah hadir dapat dilakukan dengan cara konvensional (langsung) yaitu apabila pemegang saham telah kembali ke tempat Perseroan dalam jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh hari), dapat ditandatangani langsung di tempat pemegang saham berada dengan cara *circuler resolution*. Apabila telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham maka dapat menjadi bukti telah terlaksananya RUPS telekonferensi, ketiga dapat dikirimkan melalui faksimile, dan dapat menjadi alat bukti bahwa pemegang saham telah menghadiri RUPS telekonferensi karena yang ditandatangani adalah di atas kertas dan tandatangan tersebut merupakan tandatangan yang dibubuhkan dalam dokumen asli, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yaitu: "dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) UU ITE harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan."

Terdapat beberapa hal yang diatur dalam UU ITE yaitu mengatur tentang registrasi untuk tandatangan digital itu juga bisa dilakukan oleh jabatan Notaris, yang pada hakikatnya aturan tersebut sudah mengakomodasi konsep *cyber notary*. Kemudian juga diatur dalam beberapa Undang-Undang seperti UU Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwasanya jabatan Notaris merupakan salah satu pejabat yang diberi kewenangan untuk menyatakan mengesahkan *copy* dari dokumen yang dibuat oleh pejabat pemerintah. (Wira Fransisca, 2021).

Dokumen yang dibuat pejabat pemerintah berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan itu dapat dibuat secara

elektronik(Makarim, 2015). Sebenarnya konsep ini sudah berlaku dikalangan Notaris dalam konteks mencatatkan terhadap SK ataupun surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh administrasi hukum umum oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, karena sudah lama AHU mengeluarkan surat-surat yang terkait dengan badan hukum dan badan usaha dan juga fidusia untuk dokumen yang bersifat elektronik. Kemudian Notaris bisa menyatakan bahwa dokumen yang diunduh dari sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) itu adalah dokumen yang sah, dimana kewenangan ini diatur dalam peraturan menteri hukum dan HAM terkait dengan PT, Yayasan, Perkumpulan, Fidusia dan Badan Usaha.

Pasal 5 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dalam Pasal

6 dinyatakan bahwa selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik.

Segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum maka disebut akta dibawah tangan. Daya kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta autentik memiliki daya pembuktian lahiriah, formil dan materil. Berbeda halnya dengan akta bawahtangan, dimana tidak memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, namun hanya sebatas pada daya pembuktian formil dan materiil dengan bobot lebih rendah dibandingkan akta autentik.

Setiap orang atau pihak yang mengajukan informasi elektronik tersebut harus dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk menjamin bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut. Kaitannya dengan akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui *video conference* adalah akta risalah RUPS ini dapat dikatakan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian formil, materiil, dan lahiriah, dan karena telah melalui prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang maka dapat dikatakan akta risalah RUPS melalui *video conference* sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Miftahul Machsun, berpendapat bahwa dengan kekuatan pembuktian yang sempurna tersebut, maka Akta Berita Acara RUPS tersebut mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu :

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah/luar, dalam artian bahwa Akta Berita Acara RUPS tersebut mempunyai

kemampuan untuk membuktikan sendiri keabsahannya, yang lazim disebut dalam bahasa latin dengan *acta publica probant seseipsa*. Oleh karenanya itu hakim maupun pihak yang berperkara wajib menganggap bahwa Akta Berita Acara RUPS tersebut sebagai Akta Autentik hingga pihak lawan dapat membuktikan Akta yang bersangkutan bukan sebagai Akta Autentik.

- b. Kekuatan pembuktian formal, dalam arti Pernyataan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam Akta tersebut adalah sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan oleh Notaris sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewenangan dalam membuat Akta tersebut dalam menjalankan jabatannya. Hal tersebut menjadi dasar bahwa segala sesuatu yang dinyatakan dalam Akta tersebut, baik yang dituliskan langsung oleh Notaris ataupun yang dinyatakan oleh para penghadap, dinyatakan benar sebagai keterangan yang disampaikan dan dikehendaki oleh para pihak, termasuk dalam kekuatan pembuktian ini kepastian tanggal akta, kebenaran tandatangan yang terdapat dalam Akta, identitas orang-orang yang hadir serta tentang tepat di mana Akta tersebut dibuat.
- c. Kekuatan pembuktian material, dalam arti isi akta itu, dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh membuat Akta itu sebagai alat bukti terhadap dirinya (Miftahul Machsun,2012).

Bahwa tidak semua dokumen elektronik dan atau informasi elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah. Walaupun UU ITE mengatur dokumen elektronik/informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang

sah berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Bahwa dengan dikeluarkannya UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan maka penggunaan dokumen elektronik telah diakui oleh hukum.

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pelaksanaan RUPS Elektronik

Seiring dengan perkembangan zaman, maka berdampak pula pada perkembangan praktek perdagangan, seperti adanya penggunaan tandatangan elektronik dalam suatu perjanjian (Thamaroni Usman,2020). Tanda tangan elektronik dibuat menggunakan teknik *cryptography*, dan *public key cryptography* dan diperoleh melalui transaksi perjanjian terlebih dahulu, hal ini berdasar pada Pasal 1320 KUHPdata.

Keberadaan indikasi tanda tangan artinya merepresentasikan adanya suatu perbuatan pembuktian berasal yang menandatangani terhadap apa yang ditandatanganinya, oleh karena itu sebelum melakukan penandatangan hendaknya membaca terlebih dahulu serta menyelidiki informasi tadi kemudian membubuhkan ciri-ciri dirinya sebagai subjek aturan yang bertanggung jawab atas info tersebut (Makarim,2011).

Dalam pembuatan akta Berita Acara Rapat melalui *cyber notary* maka pembubuhan tanda tangan harus dilakukan dalam bentuk elektronik. Dalam pengertian tanda tangan elektronik adalah suatu tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi (Sentosa Sembiring, 2009). Berikut pengaturan UU ITE yang mengatur mengenai tandatangan elektronik yang mengatur sebagai berikut Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - 1) segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - 2) segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - 3) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda tangannya;
 - 4) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Beberapa ahli berpendapat bahwa tanda tangan elektronik sudah seharusnya diterima keabsahannya sebagai tanda tangan. Dengan alasan-alasan sebagai berikut: (Maghfiroh, 2015)

- a. Tanda tangan elektronik merupakan tanda-tanda yang bisa dibubuhkan oleh seseorang atau beberapa orang yang diberikan kuasa oleh orang lain yang berkehendak untuk diikat secara hukum.
- b. Tanda tangan elektronik dapat dibuat atau dibubuhkan dengan menggunakan peralatan mekanik seperti halnya tanda tangan tradisional.
- c. Tanda tangan elektronik sangat mungkin bersifat lebih aman atau

lebih tidak aman sebagaimana pada tanda tangan tradisional.

Dalam konteks tanda tangan elektronik persyaratan adanya niat penandatanganan yang merupakan suatu keharusan juga dapat terpenuhi sebagaimana halnya dalam kasus tanda tangan tradisional.

Sebagaimana halnya dengan tanda tangan tradisional, tanda tangan elektronik juga dapat diletakkan di bagian mana saja dari suatu dokumen, sehingga tidak harus diletakkan di bagian bawah dokumen, kecuali hal tersebut disyaratkan oleh mekanisme perundang-undangan.

Selanjutnya perlu dipahami bahwa suatu *Digital Signature* atau lebih dikenal tanda tangan elektronik, bukan merupakan suatu gambar tanda tangan yang di-scan atau menggunakan alat pemindai selanjutnya ditempatkan pada suatu dokumen, sehingga memberi kesan bahwa suatu dokumen pada layar monitor komputer telah ditandatangani. Pengertian tanda tangan elektronik yang sebenarnya menurut UU ITE bisa dibuat dengan berbagai cara antara lain dengan sebuah kode digital yang ditempelkan pada pesan yang dikirimkan secara elektronik, yang secara khusus akan memberikan identifikasi khusus dari pengirimnya (Grace Wahyuni, 2010).

Menurut Fennieka Kristianto, tanda tangan elektronik tersertifikasi, harus memenuhi persyaratan:

- a. memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik;
- b. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan
- c. dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi (Fennieka Kristianto, 2020).

Fennieka menyatakan “tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan pembuktian atas ciri-ciri

penandatanganan dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik”. Adapun persetujuan penandatanganan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani menggunakan indikasi tangan elektronik wajib memakai mekanisme afirmasi serta/atau prosedur lain yang memberikan maksud serta tujuan penandatanganan buat terikat dalam suatu transaksi elektronik. Jadi, indikasi tangan elektronik tadi lazimnya dilakukan di transaksi elektronik, yaitu perbuatan aturan yang dilakukan dengan menggunakan personal komputer, jaringan komputer, serta/atau media elektronik lainnya.

Berdasarkan jenisnya, akta RUPS *teleconference* termasuk dalam jenis akta *relaas* dan berdasarkan ketentuan akta *relaas*, maka keterangan Notaris dalam bentuk akta (RUPS *teleconference* dapat dipastikan keabsahannya). Walaupun para pihak tidak membubuhkan tanda tangannya pada akta tetapi Notaris yang membuat berita acaranya menjadikannya sebuah akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Berita acara RUPS termasuk RUPS *teleconference*) merupakan Akta *Relaas* (dirancang oleh Notaris) sebagai akibatnya dimungkinkan buat tidak ditandatangani oleh para pihak namun wajib ditandatangani oleh Notaris menjadi pembuat akta tersebut.

Akta *Relaas* atau akta yang didesain sang Notaris dalam praktek Notaris berisi uraian yang dipandang serta disaksikan Notaris sendiri (melalui media *video call*) atas permintaan para pihak yang dilakukan dituangkan ke pada bentuk akta Notaris (Habib Adjie, 2009).

Khusus akta *partij*, masih menjadi pertimbangan lagi penerapan tanda tangan elektronik, meskipun dengan adanya *digital signature* yang dibuktikan dengan *digital certificate* yang terpercaya, namun masih memiliki masalah terkait kepastian tempat dan waktu penandatanganan akta

(Aditya & Rosdiana, 2021). Hal tersebut diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) POJK 16/2020. Penyedia e-RUPS atau PT Tbk wajib menyerahkan kepada Notaris salinan cetakan mengenai kegiatan RUPS yang memuat:

- a. daftar Pemegang Saham yang hadir secara elektronik;
- b. daftar Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
- c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan keputusan; dan
- d. transkrip seluruh interaksi dalam RUPS. (Udin Narsudin, 2021).

Selain wajib menyerahkan salinan cetakan mengenai RUPS, penyedia e-RUPS atau PT Tbk juga wajib menyimpan semua data pelaksanaan RUPS. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (4) dan (5) POJK 16/2020. Artinya keautentikan aktanya dapat disebut sudah memenuhi kualifikasi.

SIMPULAN

Pembuatan akta RUPS melalui *teleconference* dimana para peserta rapat berada ditempat yang berbeda dengan para peserta lainnya hendaknya disebutkan secara tegas untuk menghindari akta menjadi di bawah tangan, berbeda dengan pembuatan akta RUPS Konvensional dimana pada bagian penutup akta sudah menjelaskan bahwa para peserta rapat, saksi dan notaris berada pada suatu tempat dan waktu yang sama. Dalam konteks tanda tangan elektronik persyaratan adanya niat penandatanganan yang merupakan suatu keharusan juga dapat terpenuhi sebagaimana halnya dalam kasus tanda tangan tradisional. Akta RUPS *teleconference* termasuk dalam jenis akta *relaas* dan berdasarkan ketentuan akta *relaas*, maka keterangan Notaris dalam bentuk akta (RUPS *teleconference* dapat dipastikan keabsahannya). Walaupun para pihak tidak membubuhkan tanda tangannya pada akta tetapi Notaris yang

membuat berita acaranya menjadikannya sebuah akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Berita acara RUPS termasuk RUPS (*teleconference*) merupakan Akta *Relaas* (dirancang oleh Notaris) sebagai akibatnya dimungkinkan buat tidak ditandatangani oleh para pihak namun wajib ditandatangani oleh Notaris menjadi pembuat akta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A., & Rosdiana, A. C. (2021). Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk. 04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). *Indonesian Notary*, 3(2).
- Kristianto, F. (2020). Legalitas Tandatangan Elektronik, Webinar Refreshing & Up Grading Kerja Sama Antara Pengda Kab Bekasi IPPAT-Jababeka Residence-Bpn Kab Bekasi.
- Wahyuni, G. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS Telekonferensi Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Tentang PT Dan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Tesis, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2010
- Adjie, H. (2009). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti).
- Hasil wawancara dengan Aulia Taufani, Notaris/PPAT Kota DKI Jakarta, pada tanggal Miftahul Machsun, *Kekuatan Pembuktian Materiil dari Akta Autentik, Acara Pembekalan dan Penyelenggaraan Pengetahuan Dalam Rangka Kongres I.N.I ke XXI di Yogyakarta*, 2012
- Hasil Wawancara dengan Udin Narsudin, Notaris/PPAT, pada tanggal 15 Januari 2021
- Hasil Wawancara dengan Winanto Martani, pada tanggal 15 Januari 2021
- Hasil Wawancara dengan Wira Fransisca, Notaris/PPAT Kota Bandung, pada tanggal 19 Januari 2021
- Maghfiroh, N. (2015). ALAT BUKTI DAN MASALAH YANG TIMBUL DALAM PERJANJIAN SEJAK PELAKSANAAN UU ITE. *JURNAL TRANSFORMASI*, 11(1).
- Makarim, E. (2011). Notaris dan Tanda Tangan Elektronik, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada).
- Makarim, E. (2015). Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(4), 508–570.
- Machsun, M. (2012). Kekuatan Pembuktian Materiil dari Akta Autentik, Acara Pembekalan dan Penyelenggaraan Pengetahuan Dalam Rangka Kongres I.N.I ke XXI di Yogyakarta
- Rizkiyanti, W. (2017). Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya). *Jurnal Yuridis*, 3(1), 83–98.
- Sembiring, S. (2009). Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Bandun: Nuansa Aulia)
- Sinardi Syawal S. Siagian, *Legalitas Cyber Notary dan Tandatangan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara
- Thamaroni Usman, Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata, *Indonesian Private Law Review*, Volume 1 Issue 2, 2020
- Hasil wawancara dengan Wira Fransisca, Notaris/PPAT Kota Bandung, pada tanggal 19 Januari 2021
- Hasil wawancara dengan Aulia Taufani, Notaris/PPAT Kota DKI Jakarta, pada tanggal 19 Januari 2021